

**PENGARUH PENGETAHUAN ANGGOTA DEWAN
TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN
DAERAH DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT
SEBAGAI VARIABEL MODERATING**

Jufri Darma, SE, M.Si
(Universitas Negeri Medan)
Ali Fikri Hasibuan, SE, M.Si
(Universitas Negeri Medan)

Abstract

The purpose this research to examine: 1) influence the knowledge of council member about budget on region financial controll, 2) influence of the society participation on relation between the knowledge of council member about budget with region financial control. The quesioner the competentness to test a number of 33 eksemplar. The research uses regression analysis by SPSS version window for 16.

The result of hypothesis testing shows that: 1)The knowledge of council member about budget doesn't have significant influence on region financial controll, 2) The the society participation have a significant influence on relation between the knowledge of council member about budget with region financial controll

Keywords : council member, knowledge about budget, society participation and region financial controll

I. PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang Masalah

Penerapan Undang-Undang tentang Otonomi Daerah menuntut *good governance* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang harus mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Sehubungan dengan hal tersebut maka peran dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut Dewan) menjadi semakin strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah dengan cara mengawasi penggunaan keuangan daerah (APBD).

Secara umum, lembaga legislatif (DPR/DPRD) mempunyai tiga fungsi yaitu: 1) Fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), 2) Fungsi anggaran (fungsi untuk menyusun anggaran) dan 3) Fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif). Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa: 1) Pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, 2) Anggota dewan berwenang memerintahkan pemeriksa eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran.

Pengawasan keuangan daerah (APBD) secara efektif hanya dapat dilakukan oleh DPRD apabila anggotanya terdiri dari SDM yang berkualitas tinggi. Masalah utama yang dihadapi Daerah adalah kurangnya sumberdaya manusia daerah yang berkualitas sehingga fenomena yang ada lemahnya pengawasan terhadap keuangan daerah (APBD). Oleh sebab itu diperlukan suatu penelitian yang berkaitan dengan masalah ini.

Pada penelitian ini fungsi anggota dewan yang akan dibahas adalah fungsi pengawasan terhadap keuangan daerah (APBD). Permasalahannya adalah apakah dalam melaksanakan fungsi pengawasan lebih dipengaruhi oleh pengetahuan anggota dewan tentang anggaran ataukah lebih disebabkan faktor lain. Disamping itu, apakah partisipasi masyarakat juga akan berpengaruh terhadap pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD)?
2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD)?

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 Pengertian Keuangan Daerah

Dalam pasal 1 PP. No. 105 tahun 2000 pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka APBD.

Bertolak dari pengertian keuangan negara tersebut diatas, maka pengertian keuangan daerah pada dasarnya sama dengan pengertian keuangan negara dimana “negara” dianalogikan dengan “daerah”. Hanya saja dalam konteks ini keuangan daerah adalah semua hak-hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang.

2.1.2. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal 1 (6) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan

hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo, 2001). Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dilakukan mulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD dan pertanggungjawaban APBD. Alamsyah (1997) menyebutkan bahwa adanya tujuan pengawasan APBD adalah untuk 1) Menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan., 2) menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan, dan 3) menjaga agar hasil pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

2.1.3. Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran

Dalam menjalankan fungsi dan peran anggota dewan, kapasitas dan posisi dewan sangat ditentukan oleh kemampuan *bargaining position* dalam memproduksi sebuah kebijakan. Kapabilitas dan kemampuan dewan yang harus dimiliki antara lain pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam menyusun berbagai peraturan daerah selain kepiawaian dewan dalam berpolitik mewakili-konstituen dan kepentingan kelompok dan pertainya.

Beberapa penelitian yang menguji hubungan antara kualitas anggota dewan dengan kinerjanya diantaranya dilakukan oleh (Indradi, 2001; Sjamsudin. 2001). Hasil penelitiannya membuktikan bahwa kualitas dewan yang diukur dengan pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan keahlian berpengaruh terhadap kinerja dewan yang salah satunya adalah kinerja pada saat melakukan fungsi pengawasan. Pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan pengetahuan untuk masa yang akan datang. Yudono (2002) menyatakan, bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukan secara proporsional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan lain sebagainya. Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran.

2.1.4. Partisipasi Masyarakat

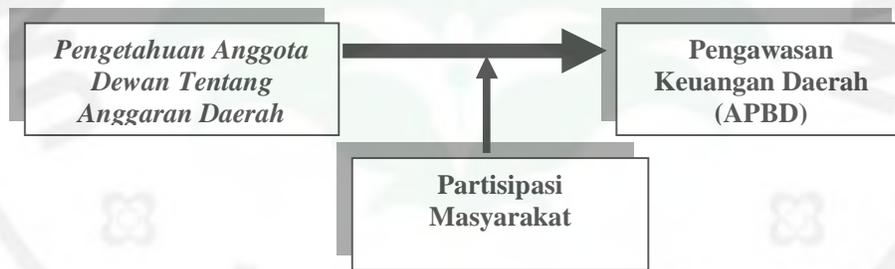
Untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi kepala instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran (Rubin, 1996). Achmadi dkk. (2002) menyebutkan bahwa partisipasi merupakan kunci sukses dari pelaksana otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud disini termasuk pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak legislatif.

2. 2. Penelitian Terdahulu

Pangawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal (Pramono, 2002). Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari pihak luar terhadap fungsi

pengawasan oleh dewan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, diantaranya adalah adanya partisipasi masyarakat. Hasil penelitian Pramono (2002) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menunjang fungsi pengawasan adalah adanya reformasi dan legitimasi wakil rakyat sedangkan factor-faktor yang menghambat fungsi pengawasan adalah minimnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kurangnya sarana dan prasarana Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Andriani (2002) menyimpulkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh dewan. Soponah dan Mardiasmo (2003) juga menyimpulkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD. Darma (2010) juga melakukan penelitian tentang hal yang sama dimana pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah

Untuk memperjelas penelitian ini maka diperlukan model penelitian. Sehingga model penelitiannya dapat digambarkan sebagai berikut:



Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

Keterangan:

Y : Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

a : Konstanta

b₁, b₂ : Koefisien regresi

x₁ : Pengetahuan anggaran

x₂ : Partisipasi masyarakat

x₁, x₂ : Interaksi antara pengetahuan anggaran dan partisipasi masyarakat

e : Error

2.3. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan uraian dari tinjauan dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

2. Partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Desain dan Sampel Penelitian

Desain penelitian ini adalah survei. Data penelitian yang dibutuhkan adalah data primer dalam bentuk persepsi responden penelitian. Pengambilan menggunakan survei langsung dan instrumen yang digunakan adalah kuesioner.

Sampel dari penelitian ini adalah semua anggota dewan dari Kota Medan. Total kuesioner akan yang disebarakan sebanyak anggota dewan di Kota Medan. Dari jumlah tersebut, kuesioner diharapkan kembali sebanyak sebanyak mungkin.

3.2. Variabel dan Pengukuran

- Variabel dalam Penelitian ini terdiri dari 2(dua) yaitu:
 - Variabel independen: pengetahuan anggota dewan tentang anggaran
 - Variabel moderating: partisipasi masyarakat
 - Variabel dependen: pengawasan keuangan daerah
- Definisi operasional:
 - Pengetahuan adalah persepsi responden tentang anggaran (RAPBD/APBD) dan deteksi terhadap pemborosan atau kegagalan, dan kebocoran anggaran.
 - Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas proses penganggaran yang dilakukan oleh dewan pada saat penyusunan arah dan kebijakan, penentuan strategi dan prioritas serta advokasi anggaran
 - Pengawasan keuangan daerah adalah pengawasan yang dilakukan oleh dewan yang meliputi pengawasan pada saat penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran (APBD).
- Pengukuran:

Masing-masing variabel diukur dengan modal skala Likert yaitu mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidak setujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 (SS = Sangat Setuju), 4 (S = Setuju), 3 (TT = Tidak Tahu), 2 (TS = Tidak Setuju), dan 1 (STS = Sangat Tidak Setuju).

3.3. Uji Reliabilitas dan Validitas

Untuk melihat reabilitas masing-masing instrumen yang digunakan, peneliti menggunakan koefisien *Cronbach Alpha*. Suatu instrumen dikatakan reliable jika memiliki nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,5 (Nunnally, 1967). Untuk mengetahui bahwa pertanyaan yang digunakan dalam instrumen valid, maka digunakan Faktor Analisis. Instrumen dikatakan valid jika memiliki nilai Kaiser, s MSA lebih besar dari 0,5 sehingga construct validity tepat (Kaiser dan Rice, 1976). Disamping itu , instrumen dapat dikatakan valid jika value lebih dari satu. Breinstein (1994).

IV.HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Sampel

Data pada penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuisioner pada anggota dewan kota medan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota dewan kota medan, sedangkan anggota dewan yang dijadikan responden adalah para ketua, sekretaris, dan anggota dewan dari fraksi dan komisi di kota medan. Responden ini dipilih karena mereka terlibat langsung dengan pengewasan keuangan daerah.

Pengembalian kuesioner sebanyak 33 eksemplar terdiri dari fraksi: 9 PAN, 3 PPP, 5 PDI-P, 3 PBB, 5 PKS, 6 GOLKAR dan 2 DEMOKRAT atau dari Komisi: 6 A, 6 B, 8C, 6 E, dan 7 E. Tingkat pendidikan terdiri dari: 2 SLTA, S1 21, dan S2 10. Bidang pendidikan terdiri dari: 6 Hukum, 8 Ekonomi, 5 Adm Pemerintah, 4 Pendidikan, 1 Pertanian, 7 Tehnik, 1 Sosial, dan 1 Agama. Pekerjaan responden terdiri dari: 23 Wiraswasta, dan 10 Swasta. Seluruhnya dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini.

4.2.Hasil Uji Kualitas Data

4.2.1 Uji Rliabelitas Data

Untuk menguji kualitas data penelitian dapat digunakan alat uji reliabilitas dan validitas terhadap data. Uji reabilitas terhadap data dilakukan untuk mengetahui kekonsistensi dan akurasi data yang telah dilumpulkan melalui kuesioner penelitian. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal, jika jawaban respoden terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu kewaktu (Ghozali, 2002).

Berdasarkan uji dapat diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel Pengawasan Keuangan Daerah (Y) sebesar 0,726, untuk variabel Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Daerah (X1) sebesar 0,789, untuk variabel Partisipasi Masyarakat (X2) sebesar 0,790, Semua variabel penelitian ini menunjukkan nilai reliabel setelah melihat koefisien *Cronbach's Alpha* untuk masing-masing variabel lebih besar dari 0,60 atau $> 0,60$ sebagaimana disyaratkan oleh Nunaly dalam (Ghozali, 2002).

4.2.2 Uji Validitas Data

Uji validitas terhadap data dilakukan untuk mengetahui kekonsistensi dan akurasi data yang telah dilumpulkan melalui kuesioner penelitian. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid atau sah, jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan di ukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2002). Penelitian ini menggunakan korelasi bivariate dalam meguji validitas.

Berdasarkan uji dapat diketahui bahwa nilai *pearson* untuk untuk variabel Pengawasan Keuangan Daerah (Y), Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Daerah (X1), Partisipasi Masyarakat (X2), keseluruhan variable penelitian menunjukkan signifikan pada tingkat 1% dan 5%.

4.3. Hasil Uji Normalitas

Untuk melihat normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan Uji Statistik. Hasil uji statistik dapat dilihat dari hasil uji signifikansi skewness dan kurtosis, *kolmogorov-Smirnov* dan grafik. Penelitian ini hanya menggunakan uji statistik *kolmogorov-Smirnov*.

Berdasarkan hasil uji dapat diketahui bahwa nilai asymp signifikansi *kolmogorov-Smirnov* untuk variabel Pengawasan Keuangan Daerah (Y) sebesar 0,733, untuk variabel Pengetahuan Anggota Dewan Ttg Anggaran (X1) sebesar 0,098, untuk variabel Partisipasi Masyarakat (X2) sebesar 0,152. Semua variabel penelitian ini menunjukkan data berdistribusi secara normal setelah melihat nilai asymp signifikansi *kolmogorov-Smirnov* pada tingkat di atas 5%. Hasil pengujian *kolmogorov-Smirnov* untuk semua masing-masing variabel menunjukkan nilai data normal untuk mengujian selanjutnya.

4.4 Hasil Uji Hipotesis

4.4.1. Hasil Uji Hipotesis 1

Pengujian hipotesis 1 bertujuan untuk menguji bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Tabel 5.1 menyajikan ringkasan hasil uji hipotesis 1 dengan menggunakan regresi linear berganda dengan tingkat signifikansi yang diisyaratkan sebesar 5%.

Tabel 5.1
Ringkasan Hasil Analisis Hipotesis 1

f	Nilai F	Sig.	Adjusted R. Square	Hipotesis
H ₁	1.440	0,239	-0.014	Ditolak

Sumber: Data Primer di olah

Berdasarkan hal tersebut diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 34,959 + 0,792X_1$$

Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah dengan *p-value* 0,239, hal ini menunjukkan nilai lebih besar dari tingkat probabilitas yang diisyaratkan sebesar 5% atau dapat dituliskan *p-value* $0,239 > 0,05$. F-hitung $1,440 < F\text{-tabel } 2,25$. Hasil ini menunjukkan hipotesis 1 tidak berhasil diterima. Artinya pengetahuan anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh dewan.

Hasil penelitian ini bila dikaitkan dengan penelitian sebelumnya menunjukkan tidak konsisten, dimana penelitian Andriani (2002), dan Soponah dan Mardiasmo (2003) menyimpulkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

4.4.2. Hasil Uji Hipotesis 2

Pengujian hipotesis 2 bertujuan untuk menguji bahwa pengaruh antara pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dimoderat variabel partisipasi masyarakat. Tabel 5.2 menyajikan ringkasan hasil uji hipotesis 2 dengan menggunakan regresi linear berganda dengan tingkat signifikansi yang diisyaratkan sebesar 5%.

Tabel 5.2
Ringkasan Hasil Analisis Hipotesis 2

H	Nilai F	Sig.	Adjusted R. Square	Hipotesis
H ₂	9.907	0.004	0.218	Diterima

Sumber: Data Primer di olah

Berdasarkan hal tersebut diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + (\beta_1 X_1) + (\beta_2 X_2) + \epsilon$$

$$Y = 36,459 + 0,025MRDXTX1$$

Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa pengaruh antara pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dimoderat variabel partisipasi masyarakat. dengan *p-value* 0,004, hal ini menunjukkan nilai lebih kecil dari tingkat probabilitas yang diisyaratkan sebesar 5% atau dapat dituliskan *p-value* $0,003 < 0,05$, $F\text{-hitung } 9,907 > F\text{-tabel } 2,25$. Hasil ini menunjukkan hipotesis 2 di berhasil diterima. Artinya pengetahuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah dimoderat variabel partisipasi masyarakat. Hasil penelitian ini bila dikaitkan dengan penelitian sebelumnya merupakan temuan baru, bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah dimoderat variabel partisipasi masyarakat.

THE
Character Building
UNIVERSITY

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil pengujian dan pembahasan terhadap penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa pengaruh antara pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dimoderat variabel partisipasi masyarakat.

5.2.Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah:

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan jumlah sampel dapat diperluas ke anggota dewan pemerintah kota dan pemerintah kabupaten dalam skala satu propinsi atau satu nasional, supaya hasil penelitian ini dapat digeneralisasi.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variable-variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi variabel pengawasan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Andriani, Rini, 2002, *Pengaruh Pengetahuan dan RPPs Terhadap Peranan DPRD Dalam Pengawasan Anggaran* (Studi Kasus Pada DPRD se-Propinsi Bengkulu, Tesis Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta).

Darma, Jufri. 210. Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah, *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*.

Indradi, Syamsiar, 2001, *Pengaruh Pendidikan dan Pengalaman anggota DPRD Dengan Proses Pembuatan Peraturan Daerah, Tesis S2 Tidak di Publikasikan, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya Malang*.

Republik Indonesia, 2001, *Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*, Citra Umbara, Bandung.

-----, 2001, *Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran*, Citra Umbara, Bandung.

-----, 2001, *Peraturan Pemerintah No.108 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah*, Citra Umbara, Bandung.

Pramono, Agus H; 2002, *Pengawasan Legislatif Terhadap Eksekutif Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Tesis S2 Tidak Di Publikasikan, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya, Malang.

Rubin, Irene, 1996, *Budgeting for accountability: Municipal Budgeting for the 1990s*, Jurnal Public Budgeting & Finance, Summer, hal.112-132.

Sjamsudin, Syamsiar, 2001, *Hubungan Kualitas Anggota DPRD Terhadap Partisipasinya Dalam Proses Kebijakan Daerah di Kabupaten Malang*, Laporan Penelitian Dalam Jurnal Ilmiah, Vol. 13, No.2, Malang.

Sopannah, Mardiasmo, 2003, *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan daerah*.

Sudono, Bambang, 2002, *Oktimalisasi Peran DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*,

TENTANG PENULIS

Jufri Darma, SE, M.Si: adalah dosen dan peneliti pada Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan. Pendidikan S1 bidang akuntansi pada FE UMSU, dan S2 dalam bidang yang sama di Universitas Padjadjaran Bandung

Ali Fikri Hasibuan, SE, M.Si: adalah dosen muda pada Fakultas Ekonomi, UNIMED. Pendidikan S1 bidang akuntansi pada FE UMSU dan S2 bidang yang sama Pasca Sarjana USU

THE
Character Building
UNIVERSITY